

Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) pada Lansia di Kecamatan Pabuaran

Nur Rizky Putri Ismaya¹

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6661200006@untirta.ac.id

Yeni Widyastuti

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
yeni.widyastuti@untirta.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Social Rehabilitation Assistance Program (ATENSI) for the elderly in Pabuaran District, especially the Elderly Food Program, has not run optimally. In practice, there is still a lack of socialization carried out by the government. The lack of human resources and budget means that the feeding program for the elderly in Pabuaran District cannot be implemented optimally. The purpose of this research is to determine the implementation of the ATENSI program for the elderly in Pabuaran District, especially the food program for the elderly. Researchers use the theory of George C. Edward III. In this research, qualitative descriptive research methods are generally carried out in the form of case studies. The method used in this research is by collecting data, namely by conducting observations and interviews. The observations carried out were in the form of direct observations of POKMAS Pabuaran. Researchers conducted several interviews with related parties such as the Social Service, Pabuaran District and POKMAS Pabuaran. The conclusion from the implementation of the Social Rehabilitation Assistance (ATENSI) program for the elderly, especially the elderly food program in Pabuaran District, is to implement a daily food delivery program for the elderly with two portions in one delivery. The aim of this food program is to improve the welfare of neglected / single family card elderly people by providing nutritious food. In the aspects of resources, communication, disposition and bureaucratic structure the program implementation is not yet optimal.

Keywords: *Implementation, Attention, Food, Elderly*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Penduduknya dapat dibagi ke dalam berbagai umur, termasuk usia produktif dan usia tidak produktif. Sebagai negara berpenduduk terpadat

keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya manusianya. Namun, tantangan dalam distribusi populasi dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama bagi pemerintah dan masyarakat.

Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar, hal ini menjadi kekuatan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sedangkan usia tidak produktif ini juga dapat berpengaruh besar terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dimana pada usia produktif merupakan usia yang rentan dengan menurunnya produktivitas atau dianggap belum waktunya produktif untuk usia (0-14 tahun) dan sudah tidak produktif untuk usia (65 tahun keatas) atau dapat dikatakan sudah lanjut usia (lansia). Pada tahun 2022, sebanyak 190.90 juta jiwa masuk kategori kelompok usia produktif yang didefinisikan sebagai rentang usia antara 15 dan 64 tahun menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Rentang usia ini penting karena masyarakat pada kelompok ini dinilai memiliki potensi terbaik untuk berkontribusi terhadap perekonomian melalui pekerjaan dan aktivitas lainnya. Sedangkan 84,8 juta jiwa tergolong usia tidak produktif. Penduduk usia yang tidak produktif tersebut terdiri dari 66,2 juta jiwa yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan 18,6 juta jiwa yang sudah tidak produktif terdiri Dari (usia 65 tahun keatas).

Peningkatan jumlah lansia di Indonesia menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Tantangan ini semakin sulit karena dampak pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Menurut WHO (2012), beban kesehatan lansia di berbagai negara berpendapatan rendah dan menengah disebabkan oleh berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung, stroke, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia juga memerlukan sistem perlindungan sosial yang lebih baik. Banyak lansia yang tidak mendapatkan jaminan pensiun atau dukungan keuangan yang memadai, sehingga mereka terpaksa bekerja meskipun kondisi fisik mereka kurang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan pemberian program yang mendukung kesejahteraan lansia.

Penduduk lansia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang drastis sehingga menimbulkan banyak permasalahan baru seperti kemiskinan, penelantaran, bahkan perilaku kekerasan dan pelanggaran hukum, sehingga membuat lansia bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya (Safian et al., 2021; Triwanti dan Gutama, 2014). Lansia terlantar adalah individu berusia di atas 60 tahun yang tinggal di lingkungan yang terabaikan dan tidak mendapat perhatian serta perawatan yang memadai dari keluarga dan masyarakat. Mereka seringkali hidup sendiri, mengalami disabilitas, mengalami diskriminasi dan eksploitasi, serta tidak mampu mengakses layanan sosial yang mereka perlukan. Terdapat dua jenis lansia terlantar yaitu terlantar secara ekonomi dimana mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan dan perawatan. Kedua, lansia terlantar secara sosial dimana mereka merasa kesepian, merasa terasingkan, kehilangan sanak saudara atau teman.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial terdapat sasaran dalam program tersebut meliputi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas serta korban bencana dan kedaruratan. Selain tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tujuan program Asistensi sosial juga ditugaskan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu upaya perlindungan terhadap Lansia (Lanjut Usia) adalah seperti dilihat pada pasal 40 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi (1) Posyandu Lansia merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kesehatan sosial bagi lanjut usia yang berbasis masyarakat.

Program Asistensi Rehabilitasi sosial terdapat dalam dua layanan yaitu layanan secara langsung yang dimana layanan tersebut menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau melalui kegiatan dukungan untuk menyediakan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan, dukungan dari keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, layanan ATENSI secara langsung dilakukan masyarakat sebagai wujud perlindungan dan menyediakan hak bagi lanjut usia. Sedangkan layanan ATENSI secara tidak langsung merupakan layanan rehabilitasi sosial yang tidak dilakukan secara langsung di masyarakat, melainkan di pusat. Dengan harapan para lanjut usia dapat lebih berdaya sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kecerdasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, umur dan kondisi fisik, serta menjaga standar yang baik.

Sementara itu, tujuan dari rehabilitasi sosial adalah memenuhi kebutuhan dasar minimal lansia terlantar, meningkatnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam menjamin hak-hak para lansia terlantar, melaksanakan perlindungan sosial dan mobilisasi sosial terhadap lanjut usia terlantar. Dalam rehabilitasi sosial juga diperlukan adanya peran pendamping yang bertugas memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup lansia. Kualitas hidup pada lansia merupakan tingkat kebahagiaan dan kepuasan terhadap peristiwa atau kondisi yang dialami lansia, dipengaruhi oleh penyakit atau pengobatan. Kualitas hidup lansia dapat dicapai melalui kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi pelaksanaan program bagi lansia untuk mengurangi beban ketergantungan lanjut usia kerja, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lansia tetap sehat, mandiri dan aktif selama mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat mereka bekerja.

Keberadaan lanjut usia di Provinsi Banten terus menerus mengalami peningkatan hal tersebut ditandai dengan angka harapan hidup yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga memerlukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan agar dapat tercapai usia tua yang sehat, bahagia, dan produktif. Program permakanan lansia merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memberikan bantuan pangan kepada lanjut usia yang membutuhkan. Program ini biasanya menyediakan makanan matang seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan air minum kemasan sebanyak dua kali sehari dalam satu kali pengantaran, dan perporsi makan hanya

diberi jatah Rp 15.000. Penyelenggaraan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada lansia di Kecamatan Pabuaran, khususnya program permakanaan, sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan kualitas hidup lansia. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia, termasuk akses terhadap makanan bergizi dan bantuan makanan pokok yang penting bagi kesehatan mereka.

Bentuk program lain dari program, Asistensi Rehabilitasi Sosial seperti bantuan sosial bagi lanjut usia antara lain penyaluran melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan program permakanaan yang merupakan komponen bantuan sosial bagi lanjut usia. Pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia ini secara khusus ditujukan kepada lanjut usia yang terdaftar dalam DTKS dan memenuhi persyaratan kelayakan program. Bantuan yang paling banyak diterima lansia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) lansia dan bantuan pangan nontunai. Rata-rata nilai bantuan yang diterima lansia berkisar Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulan. Jumlah nominal tersebut masih belum bisa memenuhi standar per kapita atau biaya hidup per kapita masyarakat Indonesia yang rata-rata Rp 1.349.000 per bulan. Selain itu, hanya 20% lansia yang menggunakan bantuan ini untuk dirinya sendiri, sedangkan 80% sisanya menyatakan bahwa dukungan sosial yang mereka terima juga digunakan oleh anggota keluarga yang tinggal bersama mereka. Penyelenggaraan program bantuan sosial Pemerintah masih menghadapi banyak kendala dan perlu perbaikan. (Laporan Riset 2020 Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia).

Penyelenggaraan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada lansia di Kecamatan Pabuaran, khususnya program permakanaan, sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan kualitas hidup lansia. Pertama, program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia, termasuk akses terhadap makanan bergizi dan bantuan makanan pokok yang penting bagi kesehatan mereka. Kedua, dengan memberikan bantuan pangan, program ini meringankan beban keuangan yang sering dihadapi para lansia, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, program ATENSI membantu mencegah isolasi sosial dengan menyediakan interaksi dan dukungan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan lansia untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka dan menerima perhatian yang mereka butuhkan.

Selain itu, pentingnya kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini tidak dapat diabaikan. Sinergi ini akan memperkuat dukungan terhadap lansia dan memastikan dukungan tepat sasaran. Seiring dengan bertambahnya jumlah lansia di Indonesia, program ini menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan demografi yang ada. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial para lansia dan memastikan mereka mendapatkan perawatan dan dukungan yang tepat seiring bertambahnya usia, maka pelaksanaan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada lansia di Kecamatan Pabuaran menjadi sangat mendesak.

Adapun data penduduk lansia yang menerima program bantuan permakanan ATENSI berdasarkan kecamatan di Kabupaten Serang pada tahun 2024 dapat kita lihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Penduduk Lansia yang Menerima Program Permakanan di Kabupaten Serang Tahun 2024

NO	Kecamatan	Penerima Manfaat
1	Kramatwatu	33
2	Bojonegara	40
3	Pulo Ampel	33
4	Kragilan	50
5	Pontang	41
6	Tanara	50
7	Kibin	50
8	Tunjung Teja	56
9	Cikeusal	50
10	Kopo	50
11	Jawilan	40
12	Pabuaran	50
13	Padarincang	50
14	Gunungsari	34
15	Bandung	50
16	Baros	56
Total		733

(Sumber: Direktorat Rehabilitasi Sosial Kab. Serang, 2024)

Dalam penelitian ini peneliti memilih Kecamatan Pabuaran sebagai lokasi penelitian, karena dalam hal ini Kecamatan Pabuaran yang pelaksanaannya sudah dan masih dilaksanakan sejak program permakanan berlangsung. Mekanisme dalam pelaksanaan program permakanan lansia di Kec. Pabuaran yang pertama dilakukan adalah identifikasi penerima manfaat, lansia yang menerima bantuan permakanan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria tertentu seperti berusia 75 tahun keatas dan tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup dan memadai.

Pemberdayaan dan pengembangan lansia dapat dilakukan dengan cara melibatkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) melalui organisasi pelayanan sosial. Organisasi pelayanan sosial diartikan sebagai sekelompok orang yang menjadi anggota suatu organisasi. POKMAS yang fungsi utamanya memberikan kebutuhan pangan secara matang berupa lauk pauk, sayur, potongan buah pada lansia dengan memasak sekaligus makanan ini diberikan dua kali sehari dalam satu kali pengantaran.

Dalam implementasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Pada Lansia di Kecamatan Pabuaran terdapat masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran yang tidak memadai serta ketidakmerataan dalam distribusi bantuan dan layanan sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi sosial. Keterbatasan ini juga mencakup kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung program tersebut.
2. Kualitas dan jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program ATENSI sering kali tidak memadai, sehingga menghambat efektivitas program. Kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai rehabilitasi sosial bagi lansia dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

Proses monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program ATENSI sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga sulit untuk menilai dampak dan efektivitas program terhadap kesejahteraan lansia.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada berbagai pendapat dari para ahli dan akademisi yang menyatakan pentingnya implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman implementasi dapat disinkronkan mulai dari konsep penelitian hingga kebijakan atau undang-undang yang menjadi fokus utama penelitian ini. Hal ini karena implementasi merupakan kegiatan kunci dalam proses perencanaan politik secara keseluruhan. Pentingnya implementasi dapat dilihat dalam beberapa pendapat para ahli.

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015: 50), “penelitian implementasi adalah penelitian yang mengkaji proses implementasi, tujuan utama dari proses implementasi itu sendiri adalah untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksana kebijakan dan juga untuk

mengetahui apakah proses implementasi memenuhi rencana atau standar yang ditetapkan, selanjutnya mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan”. Sementara itu, Horn (Tahir, 2014: 55), “memaknai implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat maupun oleh pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan”.

Teori George C. Edwards III (Agustino:2014) Menurutnya, “ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berkaitan satu sama lain. “

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan (implementor) dan kelompok sasaran (target grup) sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Kelompok sasaran harus diberi tahu tentang tujuan dan maksud kebijakan untuk mengurangi distorsi dalam implementasi. Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh khalayak sasaran, khalayak sasaran kemungkinan besar akan menolak.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan wewenang. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan efektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sehingga pengetahuan pelaksana, dan sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan tetap di atas kertas dan menjadi dokumen.

3. Disposisi

Disposisi adalah sifat dan sifat pelaksana. Jika pelaksana memiliki sikap yang baik, maka implementator akan menjalankan kebijakan seperti yang diinginkan pembuat keputusan untuk diimplementasikan. Jika pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa komitmen dan kejujuran aparat masih rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia merupakan contoh nyata dari rendahnya tingkat komitmen dan kejujuran pada mesin-mesin yang terlibat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari sebuah organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah panduan bagi siapa saja yang berlatih akting. Struktur organisasi yang terlalu panjang melemahkan kontrol dan menciptakan birokrasi, sehingga prosedur birokrasi menjadi rumit, yang pada akhirnya menyebabkan kinerja organisasi menjadi tidak fleksibel.

Komunikasi merupakan faktor pertama dalam pelaksanaan yang efektif, karena melalui komunikasi pengambil keputusan akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Melalui komunikasi yang jelas, pelaksana kebijakan dan penerima manfaat dapat memahami cita-cita suatu kebijakan, seperti apa tanggung jawabnya. Faktor lainnya adalah sumber daya untuk melaksanakan kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Selain itu, sumber daya lain, khususnya sumber daya keuangan/anggaran, sarana dan prasarana, juga penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki kualitas yang tepat dan memahami apa yang perlu dilakukan, namun jika tidak ada sarana dan prasarana untuk mengoordinasikan atau peralatan, kemungkinan besar pelaksanaan sesuai rencana tidak akan efektif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori model Edward III untuk mengimplementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Pada Lansia di Kecamatan Pabuaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Nazir mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut:

“suatu metode untuk memeriksa keadaan sekelompok orang, suatu objek, seperangkat kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menghasilkan gambaran yang deskriptif, sistematis, faktual dan tepat tentang fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti” (Nazir, 2005: 54).

Penelitian dengan model kualitatif deskriptif menggunakan teori yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. dianggap lebih masuk akal dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama implementasi program ini. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori George C. Edward III yang sangat cocok dan sangat masuk akal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Peneliti menggunakan teknik yang diterapkan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan, dan interview atau wawancara. Observasi dilakukan berupa pemantauan kepada POKMAS Kec. Pabuaran

secara langsung, sekaligus peneliti ikut melakukan pengantaran makanan pada lansia. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti Ketua Program Permakanaan lansia Dinas Sosial Kab. Serang, Ketua Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial Kec. Pabuaran, POKMAS Pabuaran, penerima manfaat program, keluarga/masyarakat penerima program. Peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif dan menyeluruh terkait pola komunikasi. Peneliti melakukan penyajian data, kesimpulan dan menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan model kualitatif deskriptif menggunakan teori yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. dianggap lebih masuk akal dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama implementasi program ini. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori George C. Edward III yang sangat cocok dan sangat masuk akal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Peneliti menggunakan teknik yang diterapkan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan, dan interview atau wawancara. Observasi dilakukan berupa pemantauan kepada POKMAS Kec. Pabuaran secara langsung, sekaligus peneliti ikut melakukan pengantaran makanan pada lansia. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti Ketua Program Permakanaan lansia Dinas Sosial Kab. Serang, Ketua Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial Kec. Pabuaran, POKMAS Pabuaran, penerima manfaat program, keluarga/masyarakat penerima program. Peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif dan menyeluruh terkait pola komunikasi. Peneliti melakukan penyajian data, kesimpulan dan menganalisis data.

Keadaan Penduduk

Berikut ini adalah data jumlah penduduk di Kecamatan Pabuaran pada tahun 2022:

Tabel 2

Penduduk di Kecamatan Pabuaran Tahun 2022

Jumlah Penduduk				
No	Desa	Perempuan (Jiwa)	Laki- laki (Jiwa)	L+P (Jiwa)

1	Talagawarna	752	888	1640
2	Sindangsari	4.338	4.635	8.973
3	Sindangheula	4.022	4.214	8.236
4	Pancanegara	3.275	3.472	6.747
5	Pabuaran	3.678	3.889	7.567
6	Pasanggrahan	2.001	2.131	4.132
7	Kadubeureum	2.976	3.087	6.063
8	Tanjungsari	1.816	1.888	3.704
Total				47.062

(Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab.Serang)

Data tersebut menunjukkan penduduk Kecamatan Pabuaran yang terdiri dari 8 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 47.062 ribu jiwa. Jika dilihat dari penduduk paling sedikit yaitu Desa Talagawarna sebanyak 1.640 jiwa. Dan desa dengan penduduk terpadat ada pada Desa Sindangsari yaitu sebanyak 8.973 jiwa. Jika dihubungkan dengan program permakanan lansia besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Pabuaran mempengaruhi pelaksanaan program permakanan. Dalam program ini, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam mendaftarkan penerima manfaat menjadi semakin sulit. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan pangan kepada para lansia, terutama mereka yang hidup sendiri atau berada dalam kemiskinan. Seiring dengan bertambahnya populasi lansia, pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan efektivitas program bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Tabel 3
Penduduk Lansia Penerima Manfaat (PM) Program Permakanan Kecamatan Pabuaran 2024

No	Nama	Usia (Tahun)
1	Sadiah	94

No	Nama	Usia (Tahun)
2	Sariah	92,87
3	Nurjaman	90,87
4	Satariah	90
5	Saprah	89,94
6	Jundra	88,9
7	Kajar	88,73
8	Misah	88,05
9	Sapinah	87,98
10	Emun	85,58
11	Marpuah	83,75
12	Markinah	83,66
13	Juhariah	83,64
14	Enah Bt H.Tair	83,63
15	Anariah	83,49
16	Jawariah	83,41
17	Mamnuah	83,4
18	Umyanah	83,3

No	Nama	Usia (Tahun)
19	Udi	83,16
20	Hj Dap Ah	83,08
21	Mae	82,7
22	Sukaesih	82,57
23	Jamara	82,54
24	Saadah	81,71
25	Ipah Saripah	81,46
26	Armi	81,08
27	Kamsinah	80,99
28	Anah	80,89
29	Rumenah	80,67
30	Asna	80,47
31	Muhanah	78,91
32	Arman	78,74
33	Jamak Sari	78,7
34	Onah	78,63
35	Misnati	78,57

No	Nama	Usia (Tahun)
36	Jamsi Bt Jamsir	78,5
37	Saniman	78,4
38	Junaedi	78,29
39	Rabiah	78,28
40	Isah	78,2
41	Komarudin	77
42	Saba'ah	76,91
43	Supiah	76,71
44	Badriah	76,48
45	Sarimah	76,06
46	Munawaroh	75,91
47	Arba'iyah	75,9
48	Rohaeti	75,82
49	Saadah	75,5
50	Murta	75,22

(Sumber: POKMAS Pabuaran Indah, 2024)

Data diatas menunjukan nama – nama Penerima Manfaat (PM) dalam program permakanaan di Kecamatan Pabuaran. Adapun PM dengan usia paling tua yaitu Ibu

Sadiah berusia 94 tahun dengan beralamat di Kp. Kadukacapi. PM lansia paling muda yang mendapatkan program adalah bapak Murta berusia 75,22 beralamat di Kp. Pasir Wadas.

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat dalam program permakanan lansia di Kecamatan Pabuaran penerima manfaatnya dinilai masih sedikit karena kendala anggaran dan kendala operasional. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas program untuk mencakup lansia yang membutuhkan bantuan. Penting untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan distribusi program permakanan agar seluruh lansia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan akses makanan yang bergizi.

Program permakanan lansia di Kecamatan Pabuaran dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pabuaran Indah, yang dimana POKMAS Pabuaran Indah berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat lokal untuk bersama-sama membantu lansia yang membutuhkan, sehingga meningkatkan kesadaran sosial dan kerjasama dalam masyarakat.

Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada lansia di Kecamatan Pabuaran adalah dengan melakukan pelaksanaan Program Permakanan Lansia yang telah dilaksanakan sejak bulan oktober tahun 2023, yang dimana pelaksanaannya diberikan pada lansia terlantar dengan kartu keluarga tunggal. Pelaksanaannya dilakukan setiap hari dua porsi makanan dengan satu kali pengantaran. Pada penelitian ini peneliti memakai teori George C. Edwards III untuk sebagai acuan dalam menyusun penelitian.

1.1 Komunikasi

Implementasi akan efektif jika tindakan dan tujuan kebijakan dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses yang sangat kompleks dan sulit. Selain itu, sumber informasi yang berbeda menimbulkan penafsiran yang berbeda pula. Dalam pembahasan hasil permasalahan komunikasi yang muncul dari pelaksanaan program permakanan pada lansia di Kecamatan Pabuaran peneliti juga memaparkan dalam 3 (tiga) poin yang terdapat dalam komunikasi, sebagai berikut:

1.1.1 Transmisi

Komunikasi merupakan faktor kunci dalam komunikasi antar pelaksana program dan penerima manfaat program. Salah satu permasalahan dalam proses komunikasi di program permakanan ini adalah kurangnya sosialisasi antar pelaksana program dengan penerima program. Proses sosialisasi hanya dilaksanakan dalam struktur sektoral saja, melalui Dinas Sosial Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran dan POKMAS Pabuaran. Sosialisasi antar pelaksana program membahas beberapa hal seperti menjelaskan tujuan dan mekanisme program permakanan yang akan dilaksanakan, menyampaikan kriteria penerima manfaat secara jelas kepada POKMAS, seperti usia, status

ekonomi, dan kondisi kesehatan lansia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan permakanan.

1.1.2 Kejelasan

Terdapat kendala mengenai pola komunikasi yang ada saat ini. Kendala tersebut diantaranya adalah kurang jelasnya sosialisasi yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan atau kekhawatiran masyarakat akan program permakanan yang dikhawatirkan terdapat unsur politik, awalnya terdapat beberapa penolakan dari penerima manfaat program karena pada awal dilaksanakannya program sedang maraknya masa masa pemilu.

Masyarakat Kec. Pabuaran menunjukkan sikap kritis terhadap isu-isu politik yang berkembang. Seperti halnya ketika awal pemberian program permakanan pada lansia yang dilaksanakan pada masa pemilu, masyarakat sempat mengkritisi program permakanan yang mirip dengan program calon presiden Prabowo dan Gibran. Kejelasan informasi merupakan hal terpenting dalam program permakanan pada lansia agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pelaksana dengan penerima manfaat.

1.1.3 Konsistensi

Menurut Edward III dalam Augustino, perintah yang diberikan dalam melakukan komunikasi harus dipersiapkan dan jelas agar dapat mengambil keputusan atau mencapainya. Jika suatu pesan sering berubah, pelaksana dalam program permakanan lansia mungkin mengalami masalah. Oleh karena itu, kecocokan dalam berkomunikasi juga harus diperhatikan.

Konsistensi POKMAS Pabuaran dalam pelayanan dapat dilihat dari pemberian makanan yang berdasarkan empat sehat lima sempurna. Jika tidak ada konsistensi dalam pemberian makanan kemungkinan kesejahteraan pada lansia tidak optimal, karena kurangnya nutrisi yang diberikan dapat berdampak pada kesehatan lansia.

Komunikasi yang konsisten antar pelaksana program dalam perubahan data juga sangat penting, pelaksana harus selalu melakukan koordinasi agar tidak terjadi salah sasaran dalam pelaksanaannya. Tanpa koordinasi dan konsistensi yang baik, ada risiko pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai rencana, sehingga dapat membuang-buang waktu.

1.2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya ini. Menurut George C. Edward III, sumber daya dalam kebijakan publik terdiri dari beberapa elemen penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan seperti sumberdaya manusia, informasi, fasilitas dan wewenang. Ketersediaan sumber daya tersebut cukup untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Implementasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada lansia di Kecamatan Pabuaran terkhususnya pada program permakanan lansia tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, komitmen, profesionalisme dan pengetahuan dalam bekerja, namun kuantitasnya tergantung pada jumlah sumber daya manusia yang mampu mencakup seluruh kelompok sasaran atau tidak.

Dalam program permakanan lansia yang melaksanakan program secara langsung adalah POKMAS Pabuaran, namun Lembaga lain yang terlibat yaitu Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Pabuaran dan Dinas Sosial Kabupaten Serang. POKMAS berperan penting dalam berbagai aspek program, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penyampaian hasil kerja. Peran POKMAS tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan hasil pembangunan. POKMAS membantu meningkatkan kehidupan masyarakat luas melalui pendidikan dan kegiatan produktif.

Sumber daya merupakan faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dan dalam implementasi harus memulai persiapan berdasarkan pengetahuan, kekuatan, dan persiapan berdasarkan pemahaman dan pola pikir. Program permakanan pada lansia membutuhkan kuantitas SDM yang memadai agar program dapat berjalan dengan maksimal. Dalam program permakanan pada lansia baik ditingkat Kabupaten Serang maupun Kecamatan Pabuaran, pelaksana kegiatan masih dinilai kurang banyak. Dimana pada praktiknya pendamping rehabilitasi di Kabupaten Serang hanya ada 4 orang.

Program permakanan pada lansia membutuhkan kuantitas SDM yang memadai agar program dapat berjalan dengan maksimal. Dalam program permakanan pada lansia baik ditingkat Kabupaten Serang maupun Kecamatan Pabuaran, pelaksana kegiatan masih dinilai kurang banyak. Dimana pada praktiknya pendamping rehabilitasi di Kabupaten Serang hanya ada 4 orang.

Untuk mendapatkan SDM yang baik terdapat beberapa kriteria untuk memenuhi suatu standar atau persyaratan untuk menjadi POKMAS. Berikut adalah beberapa kriteria yang umum diterapkan sebagai berikut:

1. POKMAS minimal beranggotakan 10 orang yang mempunyai kemampuan dan komitmen memimpin diri, diutamakan ketua RT dan RW
2. Pengusulan: Anggota POKMAS harus dicalonkan oleh pengurus kelurahan atau pengurus kelurahan dan dipastikan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Keterampilan Manajemen: Anggota POKMAS harus memiliki kemampuan mengelola anggaran dan mengelola operasional, termasuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk program permakanan

4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: POKMAS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan program pangan, termasuk standar kebersihan dan keamanan pangan.
5. Pengurus POKMAS bukan dari TNI/POLRI aktif tetapi pensiunan boleh, bukan pengurus organisasi politik, bukan SDM Kementerian Sosial yang ID (NIK) nya sudah dipakai oleh kementerian sosial.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dan dalam implementasi harus memulai persiapan berdasarkan pengetahuan, kekuatan, dan persiapan berdasarkan pemahaman dan pola pikir.

1.2.2 Informasi

Dalam pelaksanaan program permakanan pada lansia di Kecamatan Pabuaran, penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat, termasuk lansia. Dalam program permakanan pada lansia informasi yang diberikan cukup baik, namun tetap harus ditingkatkan agar informasi yang diberikan lebih optimal. Program permakanan ini yang menjadi sasaran adalah lansia, yang dimana mereka dominan untuk menggunakan Bahasa Sunda. Dalam pemberian makanan pada lansia semua POKMAS terutama kurir lansia bisa untuk berbicara menggunakan Bahasa Sunda, sehingga hal tersebut mempermudah pelaksana dalam menyampaikan informasi.

1.2.3 Wewenang

Kementerian Sosial mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman terkait program permakanan lansia, termasuk menentukan kriteria penerima manfaat utama dan pengganti. Program ini diatur dalam undang-undang Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan program permakanan pada lansia.

Wewenang Kementerian Sosial melibatkan pengawasan dan pengaturan agar program dapat berjalan dengan tepat dan optimal. Selain wewenang dalam pengawasan, peran pemerintah daerah juga mencakup pengelolaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan khususnya dalam pendampingan sosial, dan perlindungan lansia. Wewenang yang diberikan dapat berupa wewenang untuk mengelola program, serta wewenang memberikan syarat penerima program agar program tidak salah sasaran.

Wewenang Kementerian Sosial melibatkan pengawasan dan pengaturan agar program dapat berjalan dengan tepat dan optimal. Selain wewenang dalam pengawasan, peran pemerintah daerah juga mencakup pengelolaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan khususnya dalam pendampingan sosial, dan perlindungan lansia. Wewenang yang diberikan dapat berupa wewenang untuk mengelola program, serta wewenang memberikan syarat penerima program agar

program tidak salah sasaran. Adapun syarat penerima program adalah sebagai berikut:

1. Usia: Lansia berusia 75 tahun atau lebih (atau 80 tahun keatas, tergantung kebijakan daerah).
2. Data Terpadu: Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Status Pekerjaan: Bukan pensiunan atau istri/suami dari PNS atau purnawirawan TNI/Polri.
4. Identitas: Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga.
5. Usulan Resmi: Diusulkan oleh camat atau kepala distrik sebagai penerima manfaat

1.2.4 Fasilitas

Fasilitas merupakan sebuah faktor penting dalam implementasi program permakanan pada lansia. Ketersediaan fasilitas yang memadai merupakan elemen penting dalam mendukung aspek kehidupan lansia, Pemerintah setempat harus memastikan bahwa layanan dukungan bagi lansia tersedia di lokasi yang tepat dan memadai. Fasilitas juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lanjut usia, seperti pengemasan makanan yang rapih, makanan yang layak dan bernilai gizi tinggi.

Pelaksanaan program permakanan lansia dalam penyediaan fasilitasnya dinilai belum optimal, dimana masih banyak faktor yang menjadi alasan seperti terbatasnya anggaran, aksesibilitas yang jauh, sarana prasarana yang tidak memadai. Adapun rincian biaya yang di dapatkan oleh POKMAS Pabuaran dalam satu bulan untuk program permakanan sebagai berikut:

- 1) Biaya permakanan : Rp 30.000 x 46 PM x 30 hari = Rp 41.400.000
- 2) Biaya ongkos kirim : Rp 2000 x 46 PM X 30 hari = Rp 2.760.00
- 3) Biaya operasional : Rp 500.000

Total anggaran dalam sebulan sebanyak Rp 44.660.000

Dalam proses pengelolaan anggaran tersebut belum termasuk bonus anggota POKMAS sebesar Rp 300.000/bulan dan ada pula uang pulsa Rp 50.000/bulan. Dengan anggaran dan bonus yang sedikit berdampak pada keoptimalan program dan kurangnya penunjang fasilitas. Sarana dalam pengantaran makanan juga dinilai kurang, karena kurir memakai motor sehingga untuk menyimpan makanan yang akan diberikan tidak bisa sekaligus, dan sering kali harus bulak balik mengambil dan mengantarkan makanan.

1.3 Disposisi

Disposisi adalah faktor penting berikutnya dalam pendekatan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Disposisi merupakan elemen krusial dalam upaya menerapkan

kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak harus hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, tetapi juga harus memiliki disposisi yang positif.

Aspek disposisi menurut Edward III mencakup indikator sebagai berikut:

1.3.1 Efek Disposisi

Efek disposisi dalam program permakanan lansia merujuk pada pengaruh sikap dan komitmen pelaksana (POKMAS) terhadap keberhasilan atau kegagalan program permakanan. Dalam Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada lansia di Kecamatan Pabuaran khususnya pada program permakanan pada lansia sikap pelaksana dapat dikatakan baik. Pelaksana program memiliki empati, simpati dan semangat yang tinggi meski dengan upah yang minim. Dalam pengantaran secara langsung POKMAS bertugas untuk mengirimkan makanan setiap hari dengan waktu pengiriman sekitar jam 06.00 – 08.00.

Sikap pelaksana yang baik juga berpengaruh pada kepedulian keluarga atau masyarakat yang tinggal di dekat penerima manfaat, karena sebelumnya banyak keluarga atau masyarakat sekitar yang tidak peduli terhadap lansia terlantar, kini sejak adanya program permakanan mereka menjadi lebih memperhatikan lansia penerima manfaat tersebut.

1.3.2 Kesadaran Sikap Target Sasaran

Kesadaran terhadap sikap terhadap program permakanan bagi lansia sangat penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan penerimaan masyarakat. Dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti POKMAS (Kelompok Masyarakat) dalam pelaksanaan program dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap program tersebut.

Dalam pelaksanaannya pelaksana program harus memiliki integritas, agar membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program yang dilaksanakan. Ketika pelaksana menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan lebih cenderung menerima dan mendukung program tersebut. Pelaksana yang berintegritas tinggi cenderung memberikan pelayanan yang lebih baik, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi lansia tepat waktu dan sesuai standar.

Program permakanan lansia di Kecamatan Pabuaran terdapat lansia yang masih bisa dibiayai oleh keluarganya tetapi mendapatkan bantuan program, hal tersebut disebabkan oleh sanak keluarga dan masyarakat sekitar yang kurang peduli terhadap lansia tersebut.

1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan publik, termasuk program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program permakanan bagi lansia. Edward III berpendapat bahwa

SOP yang baik harus memuat kerangka kerja yang jelas, sistematis, lugas dan mudah dipahami oleh siapa pun, karena akan menjadi acuan bagi para pelaksana/pelaku kebijakan.

1.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan suatu sistem pengorganisasian yang mencakup seluruh alur proses dari awal hingga akhir. Prosedur ini berfungsi sebagai panduan untuk kinerja tugas menurut fungsionalitas dan alat evaluasi kinerja. SOP mempunyai beberapa manfaat antara lain seperti semua proses terstruktur sehingga lebih efisien waktu, menjadi sarana pelatihan bagi pelaksana, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian saat menjalankan tugas, memfasilitasi evaluasi proses operasional.

Dalam program permakanan pada lansia di Kecamatan Pabuaran terdapat beberapa standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan

a) Persiapan Makanan

Menyiapkan jenis makanan yang sesuai, seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral. Pastikan semua makanan memenuhi standar kebersihan dan gizi.

b) Jadwal Pengantaran

Melakukan pengantaran makanan sebanyak dua kali sehari dengan maksimal pemberian makan jam 11.00, sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat

c) Pelaksanaan Pemberian Makanan

Atur posisi lansia agar nyaman saat makan, berikan bantuan kepada lansia yang memerlukan, seperti menyuapi jika diperlukan

d) Pencatatan dan Evaluasi

Catat jumlah porsi makanan yang dihabiskan oleh masing-masing lansia. Lakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan kepuasan penerima manfaat.

2. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

a) Laporan Berkala

Menyiapkan laporan berkala mengenai pelaksanaan program, termasuk jumlah penerima manfaat, jenis makanan yang disediakan, dan masukan yang diterima.

b) Laporan ini harus berdasarkan SIKSMA untuk menjamin akuntabilitas.

c) Akuntabilitas Kinerja

Laporan tindak lanjut yang mencakup evaluasi kinerja program untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai dan apakah masih ada ruang untuk perbaikan.

SOP permakanan bagi lansia di Kecamatan Pabuaran menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan perbaikan.

1.4.2 Fragmentasi

Fragmentasi dalam implementasi kebijakan mengacu pada pembagian tanggung jawab dan tugas di antara berbagai unit organisasi atau badan yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Fragmentasi dalam struktur birokrasi berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Dalam monitoring hal yang dilakukan oleh pelaksana terkhusus

Dinas Sosial Kabupaten Serang dan Kecamatan Pabuaran adalah memantau setiap aktivitas dan dokumentasi program permakanan yang dilaksanakan oleh POKMAS kemudian di laporkan melalui aplikasi SIKMAS. Evaluasi dilaksanakan setiap sebulan sekali, dengan melihat apakah program dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau tidak. program dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau tidak. Supervisi dalam program permakanan lansia di Kecamatan Pabuaran pernah hanya dilaksanakann 1 kali pertemuan, hal tersebut terjadi karena keterbatasan SDM Rehabilitasi Sosial sehingga menyulitkan pelaksana.

POKMAS Pabuaran Indah berperan sebagai pelaksana atau wadah utama yang langsung melaksanakan program-program tersebut. Tanggung jawab POKMAS meliputi:

1. Bertanggung jawab dalam memasak makanan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat lanjut usia.
2. Menyelenggarakan pengiriman makanan langsung ke rumah penerima manfaat lanjut usia setelah persiapan.
3. Berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan data penerima manfaat akurat dan selaras dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada.
4. Menyiapkan laporan berkala pelaksanaan program permakanan, merinci jumlah pangan yang disiapkan dan didistribusikan, serta masukan dari penerima manfaat. Laporan-laporan ini penting untuk tujuan akuntabilitas dan evaluasi.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan lansia, sehingga menumbuhkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

Dalam monitoring hal yang dilakukan oleh pelaksana terkhusus Dinas Sosial Kabupaten Serang dan Kecamatan Pabuaran adalah memantau setiap aktivitas dan dokumentasi program permakanan yang dilaksanakan oleh POKMAS kemudian di laporkan melalui aplikasi SIKMAS. Evaluasi dilaksanakan setiap sebulan sekali, dengan melihat apakah program dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau tidak. Supervisi dalam program permakanan lansia di Kecamatan Pabuaran pernah hanya dilaksanakann 1 kali pertemuan, hal tersebut terjadi karena keterbatasan SDM Rehabilitasi Sosial sehingga menyulitkan pelaksana.

1.5 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Implementasi Program

ATENSI pada lansia di Kecamatan Pabuaran

1. Komunikasi

Faktor pendukung dalam komunikasi pada Program ATENSI pada lansia terkhususnya program permakanan lansia pada Kecamatan Pabuaran adalah konsistensi komunikasi yang baik antar pelaksana dan penerima manfaat program dalam implementasi. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi yang jelas kepada penerima manfaat dan masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan.

2. Sumber Daya

Faktor pendukung dalam sumber daya pada program permakanan lansia ini dapat dilihat dari rasa kemanusiaan dan kepedulian SDM program permakanan lansia, tanpa adanya rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama dapat berakibat pada kurangnya kesejahteraan untuk lansia penerima manfaat. Faktor penghambat dalam sumber daya pada program permakanan lansia adalah kurangnya SDM yang memadai sehingga berakibat belum optimalnya program. Dalam program permakanan lansia anggaran yang digunakan juga dapat dikatakan belum mencukupi, terutama dalam ongkos kirim pengantaran makanan, nilai porsi makanan dan upah untuk pelaksana program, sehingga hal tersebut berakibat pada sarana prasarana atau fasilitas yang kurang memadai.

3. Struktur Birokrasi

Faktor pendukung dalam struktur birokrasi program permakanan lansia ada pada SOP yang dijalankan sudah baik, terstruktur dan tidak berbelit – belit. Namun faktor penghambat pada struktur birokrasi program permakanan lansia terdapat pada monitoring, evaluasi dan supervisi yang dilaksanakan kurang optimal mengakibatkan dampak negatif yang luas terhadap tujuan program permakanan bagi lansia, sehingga perlu adanya perbaikan dalam sistem pelaksanaannya untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.

KESIMPULAN

Bentuk kesimpulan dari implementasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada lansia terkhusus pada program permakanan lansia di Kecamatan Pabuaran adalah dengan melaksanakan pengantaran program permakanan setiap hari pada lansia dengan dua porsi dalam sekali pengantaran. Tujuan adanya program permakanan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pada lansia terlanter/dengan kartu keluarga tunggal melalui pemenuhan makanan yang bergizi.

Implementasi kebijakan yang menjadi teori peneliti bahwa kebijakan tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan yang dialami oleh pemerintah, seperti Kemampuan sumber POKMAS sebagai pelaksana utama dalam program kurang optimal dalam melayani masyarakat dan

terbatasnya anggaran yang berakibat pada kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan. Dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Paburan dan POKMAS Pabuaran kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh penerima manfaat dan masyarakat sekitar mengenai program permakanan lansia.

REFERENCES

SUMBER BUKU

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Rafika Aditama
- Afrina Eka D, dkk. 2020. *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*. Laporan riset. Jakarta. Prakarsa
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Amalia Senja. (2019). *Perawatan lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*. Jakarta. Bumi Medika.
- Siti Mawiyah. 2022. Kebijakan Publik. Buku Ajar

DOKUMEN

- Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 104/4/HK.01/8/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

SUMBER LAIN

- Afrizal Zul, Zainal, Yurisman. 2019. Manajemen Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluihsicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padangpariaman Tinjauan Penggerakan Kasi Pelayanan Kebutuhan Jompo. *Al Imam : Jurnal Dakwah Manajemen*. Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019, P. Xx-Xxp- Issn :

2685-8487 E-Issn : 2685-8487
<https://Ejournal.Uinib.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Alimam>.

- Dinas sosial Kabupaten Labuhan Batu Utara. 2023. Penyaluran Program Permakanan Bagi Lansia Keluarga Tunggal Kementerian Sosial Republik Indonesia. Labuhan Batu Utara.
- Duha.J.K, Kuswanda, Endah. 2023. Efektivitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Pondok Lansia Tulus Kasih Kota Bandung. Peksos: *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Vol. 22 No. 1, Juni 2023
- Fadillah Tiwi. 2020. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Padadinas Sosial Di Kabupaten Polewali Mandar. Fakultas Dakwah Dan Komunika Uin Alauddin Makassar
- Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial. 2023. Bantuan Permakanan Diberikan untuk Lansia Tunggal dan Disabilitas Tunggal. "Laili Hariroh". Jakarta
- Munfati laili. 2023. Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar Di Kecamatan Pakal Kota Surabaya (Studi kasus Kelurahan Pakal). Jurnal inovasi Sektor Publik. Volume 3, Nomor 1, 1-10.
- Septiani Reni. 2014 Implementasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar Di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Jurnal Unesa.
- Sulastri Sri, Humaedi Sahadi. Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti. *Prosiding Ks: Riset & Pkm*. Volume:4 Nomor 1: Hal 2-3 Issn: 2442-4480